

Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Kuningan

Muhammad Farhan Waliyudin¹; Ida Widia Ningsih²; Elisa Susanti³

^{1,2,3}department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences

¹muhammad18019@Mail.Unpad.Ac.Id

ABSTRACT

THIS STUDY DESCRIBES THE COORDINATION OF THE STUNTING PREVENTION TEAM IN AN EFFORT TO ACCELERATE THE REDUCTION AND PREVENTION OF STUNTING IN KUNINGAN REGENCY. AT THIS TIME, KUNINGAN REGENCY IS INCLUDED IN ONE OF THE REGENCIES IN INDONESIA WITH A HIGH PREVALENCE OF UNDER FIVE STUNTING. CONSIDERING THAT THE PROBLEM OF STUNTING IS A MULTIDIMENSIONAL PROBLEM, GOOD COORDINATION IS NEEDED BETWEEN THE AGENCIES INVOLVED IN ITS IMPLEMENTATION. HOWEVER, IN REALITY THE COORDINATION IN EFFORTS TO ACCELERATE THE REDUCTION AND PREVENTION OF STUNTING IN KUNINGAN REGENCY IS STILL NOT AS EXPECTED, SO IT IS INTERESTING TO STUDY. THE METHOD USED IN THIS STUDY IS A QUALITATIVE RESEARCH METHOD THAT AIMS TO ANALYZE, UNDERSTAND, AND EXPLAIN VARIOUS ASPECTS THAT EXIST IN THE COORDINATION OF EFFORTS TO ACCELERATE THE REDUCTION AND PREVENTION OF STUNTING IN KUNINGAN REGENCY. THE THEORY OF EFFECTIVE COORDINATION TECHNIQUES AS PROPOSED BY (BOSE, 2012). THE RESULTS OF THIS STUDY SHOWED US THAT COORDINATION IN ACCELERATING THE REDUCTION AND PREVENTION OF STUNTING IN KUNINGAN REGENCY HAD NOT FULLY MET EFFECTIVE COORDINATION TECHNIQUES. THIS IS DUE TO THE ABSENCE OF A CLEAR AND DETAILED DIVISION OF TASKS AND RESPONSIBILITIES BETWEEN THE AGENCIES INVOLVED, FREQUENT CHANGES IN MEMBERSHIP, ESPECIALLY IN STRATEGIC POSITIONS IN THE KUNINGAN REGENCY STUNTING MANAGEMENT TEAM DUE TO MUTATIONS, AND THE ABSENCE OF WRITTEN STANDARD OPERATING PROCEDURES THAT SERVE AS JOINT GUIDELINES, MANAGEMENT OF STUNTING DATA MANAGEMENT THAT IS NOT OPTIMAL AND INTEGRATED, ACTIVE PARTICIPATION OF MEMBERS IN THE IMPLEMENTATION OF COORDINATION MEETINGS IS STILL LACKING, AND THE LEADERSHIP OF THE TEAM LEADER HAS NOT BEEN EFFECTIVE IN COORDINATING AND CONTROLLING THE IMPLEMENTATION OF ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION AND PREVENTION IN KUNINGAN REGENCY.

KEYWORDS: COORDINATION, STUNTING, KUNINGAN REGENCY

COORDINATION IN EFFORTS TO ACCELERATE THE REDUCTION AND PREVENTION OF STUNTING IN KUNINGAN REGENCY

ABSTRAK

PENELITIAN INI MENJELASKAN TENTANG KOORDINASI TIM PENANGGULANGAN *STUNTING* DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN KUNINGAN. PADA SAAT INI KABUPATEN KUNINGAN TERMASUK KE DALAM SALAH SATU KABUPATEN DI INDONESIA DENGAN TINGKAT PREVALENSI BALITA *STUNTING* TINGGI. MENGINGAT PERMASALAHAN *STUNTING* MERUPAKAN MASALAH MULTIDIMENSI, MAKA DIBUTUHKAN KOORDINASI YANG BAIK DIANTARA INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAANNYA. NAMUN DALAM KENYATAANNYA KOORDINASI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN KUNINGAN MASIH BELUM SESUAI DENGAN HARAPAN, SEHINGGA MENARIK UNTUK DITELITI. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH METODE PENELITIAN KUALITATIF YANG BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS, MEMAHAMI, DAN MENJELASKAN BERBAGAI ASPEK YANG ADA DALAM KOORDINASI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN KUNINGAN. TEORI TEKNIK KOORDINASI YANG EFEKTIF SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN OLEH (BOSE, 2012) DIJADIKAN SEBAGAI ACUAN ATAU *GUIDANCE* DI DALAM PENELITIAN INI. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA KOORDINASI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN KUNINGAN BELUM SEPENUHNYA MEMENUHI TEKNIK KOORDINASI YANG EFEKTIF. HAL TERSEBUT DISEBABKAN KARENA BELUM ADANYA PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS SERTA TERPERINCI ANTARA INSTANSI YANG TERLIBAT, SERING TERJADI PERUBAHAN KEANGGOTAAN KHUSUSNYA PADA JABATAN STRATEGIS DALAM TIM PENANGGULANGAN *STUNTING* KABUPATEN KUNINGAN YANG DISEBABKAN KARENA ADANYA MUTASI, BELUM ADANYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SECARA TERTULIS YANG DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN BERSAMA, MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA *STUNTING* YANG BELUM OPTIMAL DAN TERINTEGRASI, PARTISIPASI AKTIF ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI YANG MASIH KURANG, DAN BELUM EFEKTIFNYA KEPEMIMPINAN YANG DILAKUKAN OLEH KETUA TIM DALAM MENKOORDINASIKAN DAN MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN KUNINGAN.

KATA KUNCI: KOORDINASI, *STUNTING*, KABUPATEN KUNINGAN

PENDAHULUAN

Isu stunting termasuk ke dalam permasalahan global dan nasional di mana berdasarkan data Global Nutrition Report tahun 2018 seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan stunting, tercatat 150,8 juta atau 22,2% balita di dunia mengalami permasalahan stunting (Development Initiatives, 2018). Dalam hal ini Indonesia termasuk ke dalam lima negara dengan jumlah balita stunting tertinggi. Kabupaten Kuningan, menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat prevalensi balita stunting tinggi, hal ini menjadikan Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas penanggulangan stunting secara nasional pada tahun 2018. Di mana pada tahun 2020 berdasarkan data hasil bulan penimbangan balita atas dasar tinggi badan menurut umur (TB/U) pada aplikasi EPPGBM online puskesmas, di Kabupaten Kuningan terdapat 5.016 balita yang mengalami stunting (Dinkes Kabupaten Kuningan, 2020).

Pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan di laksanakan dengan pendekatan multi-sektoral. Mengingat permasalahan stunting merupakan masalah multidimensi, maka dalam hal ini dibutuhkan suatu lembaga lintas sektor yang bisa menjadi wadah dari berbagai pihak pemerintah terkait untuk dapat saling berkoordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Lembaga lintas sektor ini merupakan Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor: 050/KPTS.204-Bappeda/2021.

Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan dibentuk untuk membantu Bupati dalam menyinergikan dan mengkoordinasikan perencanaan berbagai program, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Mengingat koordinasi di sini merupakan perpaduan yang harmonis sebagai kegiatan dari instansi yang berbeda untuk mencapai target penurunan angka prevalensi stunting di angka 19% pada tahun 2023 dari kondisi awal 29% pada tahun 2018 (Bappeda Kab.Kuningan, 2018).

Pelaksanaan sinkronisasi dituangkan melalui kegiatan rencana aksi percepatan penurunan dan pencegahan stunting Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada saat rapat koordinasi rembuk stunting, di mana seluruh pemangku kepentingan yang terhimpun dalam Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan menyepakati bahwa, Pemerintah Kabupaten Kuningan dan seluruh SKPD berkomitmen untuk melaksanakan 8 Aksi Konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting, mendukung rencana aksi kegiatan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan.

Kemudian, pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan oleh seluruh institusi yang terlibat difokuskan pada layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitive dengan sasaran utamanya yaitu rumah tangga 1000HPK di desa lokus stunting, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis situasi. berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan belum berjalan secara optimal, selain ditunjukkan oleh persentase perkembangan stunting di Kabupaten Kuningan yang fluktuatif, juga dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan setiap institusi yang belum maksimal. Di mana belum sepenuhnya menyentuh sasaran intervensi yang telah ditetapkan.

Berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan, disebabkan oleh pelaksanaan koordinasi yang masih belum dapat berjalan secara optimal oleh seluruh unsur pemangku kepentingan, sehingga menghambat pencapaian tujuan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan secara efektif dan efisien. Dengan melihat permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Koordinasi dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kuningan”.

METODE

Dalam melakukan penelitian mengenai koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan, peneliti menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif. Dasar penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah peneliti dapat memahami secara komprehensif dan dapat mengungkap berbagai masalah empiris secara cermat serta mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara tertulis mengenai koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Kemudian, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam mendapatkan berbagai data dari sumber empiris dilakukan melalui, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Lebih lanjut, proses analisis data dilakukan dengan tiga alur kegiatan yaitu, kondensasi data penyajian data, dan verifikasi. Dalam penelitian ini dipilih triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini, penulis akan memaparkan temuan penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya yang berkenaan dengan koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi literature adalah sebagai berikut:

A. Kejelasan Tujuan

Melalui tujuan yang jelas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat akan menciptakan koordinasi yang efektif (Bose, 2012) karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara harmonis atau sesuai dengan tujuan sebagaimana telah ditetapkan. Pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan tujuan menurunkan angka prevalensi *stunting* dan perbaikan gizi buruk guna menciptakan generasi yang sehat di masa depan, mengingat dampak dari *stunting* sangat besar salah satunya berdampak pada melemahnya kualitas pola pikir anak di masa depan apabila tidak segera diatasi.

Sejauh ini, seluruh SKPD yang terlibat telah memahami tujuan dilaksanakannya koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan, ditunjukkan dengan adanya komitmen untuk melakukan koordinasi yang

disesuaikan dengan kapasitas juga kewenangannya, dan keterlibatan dari setiap SKPD melalui kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan *stunting*. Hingga saat ini pedoman dalam pelaksanaan koordinasi upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan berupa dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan dan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 050/KPTS.204-Bappeda/2021 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan.

Mekanisme yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat mengenai tujuan dari pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan, dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pemaparan berbagai materi mengenai *stunting*. Namun yang masih menjadi kendala adalah belum adanya SOP secara tertulis, yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan.

B. Garis Wewenang dan Tanggung Jawab yang Jelas

Dalam pelaksanaan koordinasi upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas merupakan salah satu prinsip yang wajib ada dalam implementasinya, mengingat melalui kejelasan garis wewenang dan tanggung jawab untuk setiap pemangku kepentingan yang terlibat akan dapat memahami siapa yang akan bertanggung jawab kepada siapa dan siapa yang mengerjakan apa (Bose, 2012).

Pembagian tugas dan wewenang dalam Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan masih belum dilakukan secara optimal meskipun keanggotaannya sudah terbagi ke dalam beberapa pokja. Hanya saja

yang menjadi titik permasalahan yaitu belum dibuat dan ditetapkan tugas, fungsi, dan wewenang seluruh anggota secara mendetail. Kemudian adanya perubahan keanggotaan dalam susunan Tim Penanggulangan *Stunting* sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 050/KPTS.204-Bappeda/2021 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan juga menjadi permasalahan yang berdampak dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan.

C. Program dan Kebijakan yang Tepat dan Komprehensif

Langkah lain untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah melalui program dan kebijakan yang terdefinisi dengan baik (Bose, 2012). Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Kuningan, kegiatan penurunan *stunting* meliputi kegiatan intervensi gizi spesifik dan kegiatan intervensi gizi sensitive. Untuk kegiatan intervensi gizi spesifik dilaksanakan oleh sektor kesehatan yang ditujukan khusus untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dibawah 0-23 bulan, intervensi ini bersifat jangka pendek dan hasilnya di dapat dalam waktu relative pendek dengan kontribusi terhadap penurunan *stunting* sebesar 30%.

Kemudian, untuk kegiatan intervensi sensitive dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum dan bersifat jangka panjang dengan kontribusi terhadap penurunan *stunting* sebesar 70%. Adapun SKPD yang terlibat seperti, Disdikbud, DPUTR, DPMD, Dinsos dan beberapa institusi lainnya. Pelaksanaan fungsi koordinasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan, pengembangan jaringan hubungan, dan pemantauan. Bappeda dalam pelaksanaannya memiliki peran penting dalam

melaksanakan koordinasi perencanaan umum, melakukan dukungan berbagai program dan anggaran, serta yang tidak kalah pentingnya melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan koordinasi tim penanggulangan *stunting* Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* melalui program dan kebijakan yang komprehensif masih belum dapat berjalan dengan baik meskipun memang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. Di mana hal ini dilihat dari adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di masa pandemi, adanya keterbatasan dari sisi pendanaan, dan manajemen pengelolaan data *stunting* yang belum optimal, sehingga intervensi yang dilakukan belum dapat mencakup sasaran desa lokus *stunting* yang telah ditetapkan.

D. Kerjasama

Kerjasama dalam pelaksanaan koordinasi yang harmonis merupakan satu hal yang tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi satu kesatuan yang terikat. Di mana dalam hal ini, kerjasama dapat dilihat dari adanya rasa saling membantu secara sukarela dan peduli dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik secara individu di dalam internal organisasi ataupun kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai koordinasi yang efektif yang mampu mendorong dalam pencapaian tujuan (Bose, 2012).

Dalam melaksanakan kerjasama upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD penggerak sekaligus pendorong dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan baik dengan seluruh SKPD terkait ataupun dengan organisasi di luar sektor pemerintahan sudah mulai berjalan dengan baik pada tahun 2021. Kerjasama dilakukan salah satunya akibat keterbatasan anggaran yang membuat

pelaksanaan intervensi tidak maksimal dan tidak mencakup seluruh desa lokus yang menjadi sasaran, melalui kerjasama yang baik diharapkan mampu mendorong percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kuningan secara cepat dan tepat sasaran.

Kerjasama yang dilakukan dalam pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan yang dilakukan dengan beberapa organisasi profesi kesehatan, organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta adalah melalui pembinaan yang dilaksanakan di desa lokus *stunting*. Adapun beberapa contoh bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu, seperti pemberian edukasi dan pemberian PMT pada balita *stunting* dan ibu hamil KEK yang dilakukan oleh Rumah Sakit KMC Luragung dan Puskesmas Ciwaru di Desa Citundun dan Desa Sagaraten. Kemudian, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memberikan bantuan berupa sembako untuk balita *stunting* di Desa Linggarjati.

Bentuk kerjasama lain dalam pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan yaitu dilakukan antar instansi seperti, Dinas Perikanan dan Peternakan yang melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, TP PKK dan para peternak sapi perah dan ayam yang tergabung dalam usaha ternak di Kabupaten Kuningan. Kerjasama dilakukan dalam melaksanakan program inovasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Kuningan yaitu Grakan Minum Susu yang diberi nama Gerimis dan Gerakan Makan Telur yang diberi nama Gemantel yang baru dilaksanakan pada tahun 2021.

E. Komunikasi yang Efektif

Dalam pelaksanaan koordinasi upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan, komunikasi yang efektif merupakan prinsip yang tidak boleh terlupakan dan wajib ada dalam pelaksanaannya karena merupakan kunci untuk

koodinasi yang tepat (Bose, 2012). Bentuk komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Bentuk komunikasi secara langsung biasa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara tatap muka dengan seluruh SKPD yang terlibat.

Bentuk komunikasi tidak langsung juga dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan. Di mana komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada pada saat ini yaitu, melalui WhatsApp grup. Hal-hal yang biasa dibicarakan di dalam grup tersebut biasanya berkaitan dengan pembahasan ringan seperti, terkait pelaksanaan program atau kegiatan *stunting* yang telah dilaksanakan, sedangkan untuk pembicaraan besar dan penting dilakukan secara langsung atau tatap muka. Mengingat pelaksanaan komunikasi secara tidak langsung dilakukan dalam rangka konsultasi, memberikan bimbingan dan arahan (Manullang, 2006).

Namun, pelaksanaan komunikasi yang efektif dalam koordinasi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari tingkat kehadiran pada saat pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan, di mana partisipasi aktif pimpinan dari setiap SKPD yang terlibat masih sangat minim yang membuat permasalahan penyebaran informasi dan permasalahan *misunderstanding* masih terjadi hingga saat ini.

F. Kepemimpinan dan Pengawasan yang Efektif

Prinsip yang tidak kalah pentingnya dari berbagai prinsip yang lain untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Dalam hal ini kepemimpinan dan pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk mencapai tujuan secara

optimal. Melalui kepemimpinan yang tepat, dapat berdampak baik dalam pelaksanaan koordinasi pada tahap perencanaan ataupun pelaksanaan. Kemudian dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan secara tepat, dapat dengan mudah dalam mengarahkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat agar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Bose, 2012).

Berdasarkan susunan kanggotaan dalam Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor: 050/PTS.204-Bappeda/2021, jabatan ketua tim diduduki oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kuningan. Dalam pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* pada dasarnya ketua tim memiliki tugas yang sangat penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional penanggulangan *stunting* di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan temuan, kepemimpinan dan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan koordinasi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena partisipasi aktif ketua tim yang masih kurang dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* seperti, terlihat dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pelaporan. Untuk kegiatan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebelumnya lebih dominan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan sebagai *leading sector*. Kemudian, adanya pergantian keanggotaan yang disebabkan karena adanya mutasi untuk ketua tim juga menjadi salah satu faktor yang cukup menghambat dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik simpulan bahwa koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan belum berjalan secara efektif. Di mana hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam teknik koordinasi yang efektif menurut (Bose, 2012). Mengingat, masih terdapat berbagai macam permasalahan yang timbul dan menjadi sebuah kendala di dalam pelaksanaan koordinasi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan.

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dan menghambat pelaksanaan koordinasi yang dilakukan diantaranya, belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terperinci antara SKPD yang terlibat, sering terjadi perubahan keanggotaan khususnya pada jabatan strategis dalam Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan yang disebabkan karena adanya mutasi, belum adanya SOP secara tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bersama, adanya keterbatasan dari sisi pendanaan karena situasi pandemi yang terjadi pada saat ini, manajemen pengelolaan data *stunting* yang belum optimal dan terintegrasi, sehingga acap kali terjadi perbedaan data dilapangan yang membuat pelaksanaan intervensi tidak maksimal, komunikasi yang belum dapat berjalan secara efektif, salah satunya dilihat dari partisipasi aktif anggota dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang masih kurang sehingga sering kali menyebabkan penyebaran informasi yang tidak merata dan adanya *misunderstanding*, dan belum efektifnya kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua tim dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan

untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan yaitu, perlu untuk segera membuat dan menetapkan SOP secara tertulis sebagai acuan bersama. Kemudian, sebaiknya dilakukan penyesuaian dan perbaikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kuningan perihal Pembentukan Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan yakni melengkapinya dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pokja-pokja dan anggota yang terlibat di dalamnya secara terperinci.

Lebih lanjut, perlu melakukan kerjasama dengan organisasi diluar sektor pemerintahan yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menciptakan sebuah inovasi baik berupa web atau aplikasi yang dapat mengintegrasikan berbagai data dari beberapa SKPD sebagai bentuk optimalisasi manajemen data *stunting*. Kemudian aplikasi tersebut juga nantinya dapat digunakan untuk mempercepat proses pelaporan yang dilakukan oleh seluruh SKPD yang terlibat. Sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dan juga Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai ketua Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan perlu untuk lebih aktif lagi dalam mendorong keaktifan seluruh SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan komunikasi, dengan cara mengadakan pertemuan melalui rapat koordinasi secara rutin dan terjadwal dengan proses penentuan jadwal ditentukan dan ditetapkan secara bersama sehingga, dalam pelaksanaan rapat koordinasi dapat diikuti oleh seluruh SKPD yang terlibat.

Kemudian untuk saran yang terakhir, sebaiknya seluruh anggota yang terhimpun dalam Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan membuat buku memori jabatan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi perubahan keanggotaan yang disebabkan karena adanya mutasi maupun rotasi, buku memori jabatan tersebut dapat dipergunakan oleh

anggota yang menduduki jabatan baru di dalam Tim Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kuningan. Sehingga anggota baru tersebut dapat memahami secara mendalam proses pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kuningan secara cepat dan dapat mengakselerasi tugas-tugas yang masih banyak dan harus segera diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kab.Kuningan. (2018). *RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023*.
- Bose, D. C. (2012). Principles of Management and Administration. In *PHI Learning Private Limited*. PHI Learning Private Limited.
- Development Initiatives. (2018). 2018 Global Nutrition Report: Shining a light to spur action on nutrition. In *Global Nutrition Report*. Development Initiatives. <https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/>
- Dinkes Kabupaten Kuningan. (2020). Status Gizi Balita hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Aplikasi EPPGBM Online di Kabupaten Kuningan Bulan Agustus Tahun 2020. In *Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan*.
- Manullang, M. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.